

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor petanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Indonesia juga mempunyai daerah potensial guna mengembangkan usaha pada sektor pertanian. Salah satunya adalah letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis, maka dari itu Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik dengan didukung kelimpahan sumber daya alam dan strateginya kondisi lingkungan.

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sektor pertanian yang cukup besar, tapi kenyataannya belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Berdasarkan data kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2015 memperlihatkan total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 %) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 %) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha

dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

Sektor pertanian Indonesia mempunyai peran strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Peranan signifikan tersebut dapat dilihat dimana sektor ini menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% GNP Indonesia (BPS,2012). Fakta tersebut menguatkan bahwa sektor pertanian adalah sebagai pilar utama yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Namun sektor pertanian di Indonesia kurang mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam membangun bangsa. Hal tersebut bisa dilihat dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain yang tidak menguntungkan bagi sektor ini. Banyaknya program pembangunan pertanian yang tidak terarah juga semakin menjerumuskan sektor ini pada keterpurukan. Banyak juga alih fungsi lahan menjadi pemukiman, pertokoan, perindustrian dan jalan tol atau fasilitas-fasilitas lainnya yang mengakibatkan semakin sempitnya lahan untuk usaha tani. Meski demikian, sektor pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Indonesia, banyak tenaga kerja yang kemudian menggeluti usaha tani untuk memenuhi kebutuhannya (<http://handokoberbagi.blogspot.co.id>).

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah,

wilayah strategis, serta mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Bisa dilihat dari Kabupaten Sragen yang mempunyai 20 kecamatan terdiri atas 208 desa dan 8 kelurahan. Kabupaten Sragen terbelah menjadi 2 (dua) wilayah oleh Sungai Bengawan Solo, yakni Utara Bengawan 11 Kecamatan dan Selatan Bengawan 9 Kecamatan. Luas lahan sawah di kabupaten Sragen mencapai 39.759 Ha yang terdiri dari: sawah pengairan teknis 18.974 Ha, setengah teknis 3.761 Ha, Sederhana 2.234 Ha, Non PU 800 Ha, Tadah hujan 13.739 Ha, Lain-lain 251 Ha. Jenis Tanah di Kabupaten Sragen adalah Grumusol, Alluvial, Latosol, Litosol dan Mediteran.

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 94.155 ha dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 1) Sebelah selatan Bengawan Solo dengan luas wilayah 32.760 ha (34,79 %) dan luas tanah sawah 22.027 ha (54,85 %) dari (9 Kec. 88 Desa & Kelurahan), 2) Sebelah utara Bengawan Solo dengan luas wilayah 61.395 ha (65,21 %) dan tanah sawah 18.102 ha (45,15 %) dari (11 Kec. 120 Desa)(<http://sragen.go.id/>).

Awal tahun 1997 pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi membuat sektor perekonomian terpuruk serta menjadikan pemerintah melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan daerahnya sebagai akibat pressure dari lembaga donor (Bawono, 2015). Harapannya di setiap daerah secara efisien dan efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan masing-masing daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah, Erdi dan Meita (2015).

Menurut Riko N dan Rafudin H (2015), dengan adanya otonomi daerah diharapkan terciptanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan, yang ditandai dengan makin kuatnya kapasitas fiskal atau PADesa suatu daerah. Sehingga daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi melalui dana perimbangan, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi yaitu untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Menurut Evelin Balandatu (2015), otonomi adalah kebijakan tentang penyerahan wewenang daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berguna dalam mengatur, mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah, sehingga konsep pembangunan lebih mengarah pada tingkatan yang terendah dalam pemerintahan. Pemerintahan desa sendiri diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan yang ada di desa agar dapat membantu memberikan kontribusi terhadap pembangunan berskala nasional.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. PADesa digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa.

Oleh karena itu peningkatan PADesa menjadi hal yang sangat penting jika, PADesa meningkat maka pemasukan untuk belanja desa ,dana pengelolaan desa, dan pembiayaan pembangunan desa menjadi meningkat. Sehingga, akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

Syarifah V H dan Amri (2016), Pembangunan daerah yang diprioritaskan pada pedesaan adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya tersebut dibutuhkan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah salah satunya adalah Dana Desa (DD), dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa guna untuk meningkatkan pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di samping itu, Misno (2015), menyatakan desa mempunyai hak Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana perimbangan kepada desa dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Sesuai dengan UU Desa yang menjelaskan bahwa sesungguhnya desa memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneliti ingin meneliti pada sektor desa, khususnya tentang penganggaran desa (APBDesa), yang mana belum pernah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada penganggaran daerah (Kabupaten/Kota) saja. Untuk itu, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang penganggaran desa dikarenakan dan ingin mengetahui perihal keuangan desa yang berfokus pada seberapa jauh perubahan pendapatan desa terhadap belanja desa sektor pertanian dan pemanfaatan sektor agraris yang ada di Kabupaten Sragen disebabkan belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti tentang desa se-Kabupaten Sragen.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sragen)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
3. Apakah terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?
4. Apakah terdapat pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
3. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
4. Untuk menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan penganggaran pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sragen).

c. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan desa, terkait dengan perhitungan dana yang

diberikan melalui dan oleh pemerintah Kabupaten Sragen baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud good governance.

d. Bagi Pembaca dan Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja desa di pemerintahan desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang jelas dan sistematis agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan ide yang menjadi landasan penelitian ini dan berisi latar belakang yang berisi hal-hal yang mengantar pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustakan. Pada bab tinjauan pustaka ini, membahas mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi beserta pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III adalah metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti mencoba untuk menganalisis dan membahas berdasarkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta menjelaskan hasil pengumpulan data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V adalah penutup. Bab penutup berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan untuk penelitian selanjutnya.